

**SEJARAH PARIWISATA INDONESIA  
TUGAS MATA KULIAH:  
TEORI, SISTEM DAN DIMENSI PARIWISATA**

**DIENY FERBIANTY  
24006313**



**PROGRAM MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN  
ALUR PARIWISATA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
2007**

**ABSTRAKSI**

Telaah pustaka sejarah pariwisata mengungkapkan perniagaan sebagai awal adanya pariwisata. Ada juga yang berpendapat bahwa penemuan roda adalah awal dari kegiatan pariwisata. Catatan lain menunjukkan, perjalanan ibadah menjadi salah satu penyebab lahirnya pariwisata.

Penemuan mesin uap, telah membawa manusia menuju pariwisata massal modern. Hal ini mendorong munculnya masyarakat kota industrial dan modern, semakin banyaknya orang yang meningkat kesejahteraanya dan meluangkan diri untuk kegiatan pariwisata.

## **PROFIL PARIWISATA INDONESIA**

Dalam sejarah nusantara, diketahui bahwa kebiasaan mengadakan perjalanan telah dijumpai sejak lama. Dalam buku Nagara Kartagama, pada abad 14, Raja Hayam Wuruk dilaporkan telah mengelilingi Majapahit dengan diikuti oleh para pejabat Negara. Ia menjelajahi daerah Jawa Timur dengan mengendarai pedati. Pada awal abad 20, Susuhunan Pakubuwono X dikenal sebagai raja yang sangat suka mengadakan perjalanan. Hampir setiap tahun beliau mengadakan perjalanan ke Jawa Tengah, sambil memberikan hadiah berupa uang. Dalam tradisi kerajaan Mataram, raja atau penguasa daerah harus melakukan unjuk kesetiaan pada keratin dua kali setiap tahunnya, sambil membawa para pejabat, pekerja yang mengangkut logistik dan barang persembahan untuk raja. Dari sinilah, pariwisata Indonesia terus berkembang, sesuai dengan keadaan politik, sosial dan budaya masyarakatnya

Kemajuan pesat pariwisata Indonesia sendiri, tidak terlepas dari usaha yang dirintis sejak beberapa dekade yang lalu. Menurut Oka A. Yoeti (1996:24), berdasarkan kurun waktu perkembangan, Sejarah Pariwisata Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode penting yaitu ; periode masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan setelah Indonesia merdeka

### **1. Masa Penjajahan Belanda**

Kegiatan kepariwisataan dimulai dengan penjelajahan yang dilakukan pejabat pemerintah, missionaris atau orang swasta yang akan membuka usaha perkebunan di daerah pedalaman. Para pejabat Belanda yang dikenai kewajiban untuk menulis laporan pada setiap akhir perjalanannya. Pada laporan itulah terdapat keterangan mengenai peninggalan purbakala, keindahan alam, seni budaya masyarakat nusantara.

Pada awal abad ke-19, daerah Hindia Belanda mulai berkembang menjadi suatu daerah yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi para pengadu nasib dari Negara Belanda. Mereka berkelana ke nusantara, membuka lahan perkebunan dalam skala kecil. Perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, dari nusantara ke

Negara Eropa menjadi hal yang lumrah, sehingga dibangunlah sarana dan prasarana yang menjadi penunjang kegiatan tersebut.

Kegiatan kepariwisataan masa penjajahan Belanda dimulai secara resmi, sejak tahun 1910 – 1912 setelah keluarnya keputusan Gubernur jenderal atas pembentukan Vereeniging Toeristen Verkeer (VTV) yang merupakan suatu biro wisata atau tourist bureau pada masa itu. Saat itu kantor tersebut digunakan pula oleh maskapai penerbangan swasta Belanda KNILM Koninklijke Nederlandsch Indische Luchtfahrt Maatschappij. yang memegang monopoli di kawasan Hindia Belanda saat itu.

Meningkatnya perdagangan antar benua Eropa dan Asia dan Indonesia pada khususnya, meningkatkan lalu lintas manusia yang melakukan perjalanan untuk berbagai kepentingan masing-masing. Untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk mereka yang melakukan perjalanan ini maka didirikan untuk pertama kali suatu cabang Travel Agent di Jalan Majapahit No. 2 Jakarta pada Tahun 1926 yang bernama Lissone Lindeman (LISLIND) yang berpusat di Belanda. Sekarang tempat tersebut digunakan oleh PT NITOUR.

Tahun 1928 Lislind berganti menjadi NITOUR (Nederlandsche Indische Touristen Bureau) yang merupakan bagian dari KNILM. Saat itu kegiatan pariwisata lebih banyak didominasi oleh orang kulit putih saja, sedangkan bangsa pribumi sangat sedikit bahkan dapat dikatakan tidak ada. Perusahaan perjalanan wisata saat itu tidak berkembang karena Nitour dan KNILM memegang monopoli.

Pertumbuhan hotel di Indonesia sesungguhnya mulai dikenal pada abad 19 ini meskipun terbatas pada beberapa kota seperti di Batavia ; Hotel Des Indes, Hotel der nederlanden, Hotel Royal, dan Hotel Rijswijk. Di Surabaya berdiri pula Hotel Sarkies, Hotel Oranye, di Semarang didirikan Hotel Du pavillion, kemudian di medan Hotel de Boer, dan Hotel Astoria, di Makassar Hotel Grand dan Hotel Staat. Fungsi hotel saat itu lebih banyak digunakan untuk tamu-tamu dari penumpang kapal laut dari Eropa. Mengingat belum adanya kendaraan bermotor

untuk membawa tamu – tamu tersebut dari pelabuhan ke hotel dan sebaliknya, maka digunakan kereta kuda serupa cikal.

Memasuki abad 20, mulailah perkembangan usaha akomodasi hotel ke kota lainnya seperti Palace Hotel di Malang, Stier Hotel di Solo, Hotel Van Hangel, Preanger dan Homann di Bandung, Grand Hotel di Yogyakarta, Hotel Salak di Bogor, dan kemudian setelah kendaraan bermotor digunakan dan jalan raya sudah berkembang, muncul pula hotel baru di kota lainnya seperti : Hotel merdeka di Bukittinggi, Hotel Grand Hotel lembang di luar kota Bandung, kemudia berdiri pula di Dieng, Lumajang, Kopeng, Tawang mangu, Prapat, Malino, Garut, Sukabumi, disusul oleh kota-kota lainnya.

Perkembangan masyarakat yang seiring dengan perkembangan jaman mempertinggi pula frekuensi perjalanan masyarakat non kulit putih sehingga berkembang pula bentuk usaha akomodasi ini menjadi Penginapan besar (Hotel) dan Penginapan kecil (Losmen). Sebagai gambaran pada tahun 1933 jumlah hotel di beberapa kota penting di Indonesia dapat dilihat dalam tabel ini

**Tabel 4.1**

**JUMLAH HOTEL DAN KAMAR DI BEBERAPA KOTA PENTING  
DI INDONESIA TAHUN 1933**

<b>KOTA</b>	<b>JUMLAH HOTEL</b>	<b>JUMLAH KAMAR</b>
MEDAN	10	353
JAKARTA	37	1.601
BANDUNG	26	999
SURABAYA	39	1.123
DENPASAR	2	63
JUMLAH	114	4.139

*Sumber : Dirjen Pariwisata*

## *Keadaan Transport*

### *a. penerbangan udara*

Keadaan transport penerbangan yang menghubungkan Indonesia dengan negara lain saat itu dimonopoli oleh KNILM . Tahun 1927 dilakukan penerbangan dengan pesawat fokker dari lapangan terbang schipol di Belanda ke Cililitan (airport Batavia waktu itu) yang ditempuh sekitar 15 hari mengingat alat angkut yang belum secanggih saat ini. Di dalam kawasan Indonesia sendiri dilakukan penerbangan terbatas yang menghubungkan Batavia (Cililitan), Bandung (Andir), Semarang (Simongan), dan Surabaya (Morokrembangan)

### *b. Transportasi Laut*

Seperti halnya KNILM pada tahun 1927, angkutan laut dimonopoli oleh KPM, namun ada pula maskapai lain yang diijinkan melayani rute-rute tertentu seperti The Loyd Triestino yang bekerja sama dengan Marnitima Italiana yang menghubungkan Genoa-Loghorn-Naples dan Batavia, kemudian ke Semarang dan Surabaya. Sedangkan World Cruises yang beroperasi ke Indonesia adalah :

- Canadian Pacific (Express of Australia)
- American Express (Bergenland)
- Caledonia (Frank and Clark)
- Franconia (Thomas Cook and Son)
- Rijndam (Floating University)
- Samaria (Roymand & Withcomb)

### *c. Kereta Api*

Jaringan Kereta api pertama kali dibangun oleh Belanda dalam untuk kepentingan militer dan angkutan barang. Pembangunan rel kereta api dalam rangka membangun jalan raya pos Anyer-Panarukan, pembangunan rel kereta api Semarang-Tanggung pada tahun 1867, menjadi bukti akan adanya hal ini.

Angkutan kereta api baru mulai efektif di pulau Jawa pada tanggal 1 Oktober 1927. Pada waktu itu para penumpang dapat melakukan reservasi tiga jam

sebelum kereta berangkat. Hubungan kereta api masih terbatas yaitu menghubungkan :

- Batavia – Buitenzorg, 4 kali sehari
- Batavia – Bandung, 4 kali sehari
- Batavia – Garut, 2 kali sehari
- Batavia – Yogyakarta, 1 kali sehari
- Batavia – Semarang (via Cirebon), 1 kali sehari

#### *d. Taksi*

Pada masa ini, telah pula dikenal alat angkut taksi yang disewa borongan sebagaimana halnya jaman kini untuk beberapa hari tour dari Batavia seperti :

- 2 days tour ke Bandung
- 3 days tour ke garut
- 6 days tour ke Yogyakarta
- 10 days tour ke Surabaya

#### Penyelenggaraan Tour

Kegiatan tour sejak tahun 1927 telah dikembangkan terutama di pulau Jawa dan Sumatra yang dikoordinir oleh LISLIND (Lissone Lindeman). Lislind menyediakan tour natal dari Weltevreden ke Preanger Regencies di Bandung dan ke Central Java. Perjalanan tersebut ditempuh selama 6 hari melalui Bandung, Garut, Yogyakarta, dengan tarif f. 140/orang. Disamping itu tersedia pula paket tour 14 days in Java by motor car and train combination, kemudian 14 days in Sumatra, dan berbagai pilihan lainnya.

#### *Kebudayaan*

Pada masa itu Indonesia telah dikunjungi oleh orang-orang ternama dalam bidang kebudayaan. Dua diantaranya yang terkenal adalah :

- Leopold Chaikovsky, conductor Philadelphia Symphony Orchestra
- Dr. Rabindranath Tagore, budayawan dunia yang mempelajari pengaruh hindu dalam kebudayaan Jawa, dan juga meneliti candi-candi hindu di Jawa dan Bali

### *Promosi*

Promosi telah diberi perhatian besar meskipun saat itu model dan teknologi promosi belum secanggih masa kini. Tercatat pada tahun 1913 telah dibuat guide book oleh VTV (Vereeniging Touristen Verkeer) yang dapat dikatakan baik sekali dalam mengenalkan daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, kawasan Sumatra, Toraja di Sulawesi Selatan, yang dicetak dalam kemasan mewah dengan menggunakan bahasa Inggris.

Pada tahun 1923 beredar pula surat kabar mingguan yang merupakan Java Tourist Guide yang diterbitkan oleh Toerist Enquiry Office Garoet yang berisi informasi tentang Express Train Service, News from abroad in brief, Who-Where-When to Hotels, Postal News, Short and Useful sentences, dan artikel kepariwisataan lainnya.

Selain dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pariwisata, material promosi dikeluarkan pula oleh perusahaan yang mengelola usaha pariwisata, yang telah menyadari pentingnya promosi. Beberapa guide book yang diterbitkan antara lain :

- Guide to see Dieng Plateau, dikeluarkan oleh Hotel Dieng
- Guide to West Java, dikeluarkan oleh Hotel Savoy Homann

Demikian pula guide book yang dikeluarkan oleh hotel lainnya.

Di negeri Belanda sendiri banyak diterbitkan artikel mengenai pariwisata Indonesia, terutama dalam majalah TOURISM yang banyak mempromosikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata. Bahan-bahan promosi yang dikeluarkan oleh VTV cukup beragam dan dicetak dalam kemasan yang baik. Untuk menyebarkan brosur-brosur pariwisata tersebut dan menampung pertanyaan serta pusat informasi pariwisata Indonesia, di kota Paris pada tahun 1920 didirikan kantor yang bernama Official Tourist Bureau for Holland and The Netherland Indie, yang beralamat di 42 Boulevard Raspail, Paris, suatu daerah perkotaan/pusat bisnis yang mewah.

### *Organisasi Kepariwisataan*

Pada masa pendudukan Belanda ini sudah banyak model jasa yang disediakan oleh badan atau organisasi pariwisata swasta dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah. Beberapa organisasi diantaranya adalah :

- Tourist Association Garoet, didirikan tahun 1923
- Tourist Association Magelang, didirikan tahun 1926
- Bandung Vooruit, didirikan tahun 1926
- Cabang-cabang VTV di setiap Daerah Tujuan Wisata lainnya

Dari beberapa catatan di kantor VTV, bahwa pada tahun 1926 wisatawan dari luar Indonesia yang mendatangi kantor tersebut untuk meminta informasi pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**JUMLAHKUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA  
KE INDONESIA TAHUN 1926**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	JUNI	391
2	JULI	466
3	AGUSTUS	1.259
4	SEPTEMBER	2.070
5	OKTOBER	1.820
6	NOPEMBER	1.271
7	DESEMBER	870

*Sumber : Dirjen Pariwisata*

**Tabel 4.3**

**PROSENTASE KEBANGSAAN  
WISATAWAN ASING TAHUN 1926**

<b>NO</b>	<b>KEBANGSAAN</b>	<b>PROSENTASE</b>
1	AUSTRALIA	20 %
2	INGGRIS	16 %
3	BELANDA	14 %
4	AMERIKA	10 %
5	JEPANG	8 %
6	CHINA	8 %
7	EROPA LAINNYA	10 %
8	NEGARA LAIN	14 %

*Sumber : Dirjen Pariwisata*

Dari catatan VTV itu pula diketahui bahwa sejak tahun 1927 Pulau Bali mulai dikenal oleh wisman dan jumlah kunjungannya meningkat sebanyak 100 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **2. Masa Pendudukan Jepang**

Berkobarnya Perang Dunia II yang disusul dengan pendudukan Jepang ke Indonesia menyebabkan keadaan pariwisata sangat terlantar. Saat itu dapat dikatakan sebagai masa kelabu bagi dunia kepariwisataan Indonesia. Semuanya porak poranda. Kesempatan dan keadaan yang tidak menentu serta keadaan ekonomi yang sangat sulit, Kelangkaan pangan, papan dan sandang, tidak memungkinkan orang untuk berwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara dapat dikatakan tidak ada.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, masa pendudukan Jepang tercatat sebagai masa yang sangat pedih dan sulit . Ketakutan, kegelisahan merajalela, paceklik, perampasan harta oleh tentara Jepang membuat dunia kepariwisataan nusantara mati. Banyak sarana dan prasarana publik dijadikan

sarana untuk menghalangi masuknya musuh dalam suatu wilayah, obyek wisata terbengkalai dan tidak terurus. Banyak hotel yang diambil alih oleh Jepang dan diubah fungsi untuk keperluan rumah sakit, asrama, dan hotel-hotel yang lebih bagus disita untuk ditempati para perwira Jepang. Data dan informasi pariwisata dalam masa pendudukan Jepang dapat dikatakan tidak tersedia

### **3. Setelah Indonesia Merdeka**

Setelah Indonesia merdeka, dunia kepariwisataan Indonesia mulai merangkak lagi. Meskipun pemerintahan Indonesia baru berdiri, namun pemerintah Indonesia waktu itu telah memikirkan untuk mengelola pariwisata. Menjelang akhir tahun 1946,, Bupati Kepala Daerah Wonosobo, mempunyai inisiatif untuk mengorganisasikan kegiatan perhotelan di Indonesia dengan menugaskan tiga orang pejabat setempat : WSoetanto, Djasman Sastro Hoetomo, dan R. Alwan. Melalui mereka inilah lahir Badan Pusat Hotel Negara, yang merupakan organisasi perhotelan pertama di Indonesia.

Pada tanggal 1 Juli 1947 pemerintah Indonesia mulai menghidupkan kembali industri – industri di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pariwisata. Sektor pariwisata mulai menunjukkan geliatnya. Hal ini ditandai dengan surat keputusan wakil presiden (Dr. Mohamad Hatta), sebagai Ketua Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, di Jogjakarta, untuk mendirikan suatu badan yang mengelola hotel-hotel yang sebelumnya dikuasai pemerintah pendudukan.

Badan yang baru dibentuk itu bernama HONET (Hotel National & Tourism) dan diketuai oleh R Tjipto Ruslan. Badan tersebut segera mengambil alih hotel – hotel yang terdapat di daerah : Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Cirebon, Sukabumi, Malang, Sarangan, Purwokerto, Pekalongan, yang semuanya diberi nama hotel merdeka.

Terjadinya KMB (Konferensi Meja Bundar) pada tahun 1949 mengakibatkan perkembangan lain, mengingat salah satu isi perjanjian KMB adalah bahwa seluruh harta kekayaan milik Belanda harus dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu ahirnya HONET dibubarkan dan selanjutnya berdiri

badan hukum NV HORNET yang merupakan badan satu-satunya yang menjalankan aktivitas di bidang perhotelan dan pariwisata.

Tahun 1952 dengan keputusan presiden RI, dibentuk **Panitia Inter Departemental Urusan Turisme** yang diketuai oleh Nazir St. Pamuncak dengan sekertaris RAM Sastrodanukusumo. Tugas panitia tersebut antara lain menjajagi kemungkinan terbukanya kembali Indonesia sebagai daerah tujuan wisata. Pada Tahun 1953 beberapa tokoh perhotelan akhirnya mendirikan Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia (SERGAHTI) yang diketuai oleh A Tambayong, pemilik hotel Orient yang berkedudukan di Bandung. Badan tersebut dibantu pula oleh S Saelan (pemilik hotel Cipayung di Bogor), dan M Sungkar Alurmei (Direktur hotel Pavilion/Majapahit di Jakarta), yang kemudian mendirikan cabang dan menetapkan komisaris di masing masing daerah di wilayah Indonesia. Keanggotaan SERGAHTI pada saat itu mencakup seluruh hotel di Indonesia. Disamping SERGAHTI, beberapa pejabat tinggi Negara yang posisinya ada kaitannya dengan dengan aspek pariwisata Indonesia dan beberapa anggota elite masyarakat yang peduli terhadap potensi pariwisata nasional mendirikan Yayasan Tourisme Indonesia atau YTI pada tahun 1955, yang nantinya akan menjadi DEPARI, Dewan Pariwisata Indonesia yang menjadi cikal bakal Departemen Pariwisata dan Budaya saat ini. Hal ini akan dibahas lebih rinci pada paparan di bawah.

Pada tahun 1955 Bank Industri Negara mendirikan perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas dengan nama PT NATOUR Ltd. (National Hotel and Tourism Corporation Limited). Perusahaan ini dipimpin oleh Singgih dan S Haryowiguno, dan memiliki hotel di Jakarta (Hotel Transaera), Bali (Hotel Bali, Kuta Beach Hotel, dan Sindhu Beach), Jayapura (Hotel Jayapura).

### *Lahirnya Yayasan Tourisme Indonesia*

Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, membawa dampak terhadap perkembangan kepariwisataan Indonesia. Kunjungan wisatawan ke Indonesia meningkat kembali, disertai dengan meningkatnya gairah kebangkitan usaha pariwisata lainnya. Untuk meningkatkan efektifitas usaha pariwisata, dibentuklah YTI (Yayasan Tourisme Indonesia), dengan satu tujuan yaitu memberi arti dan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Badan ini bersifat non komersial, diurus oleh insan pariwisata swasta maupun pemerintah yang dibiayai oleh donatur dan sokongan berbagai pihak. Gerakan dan promosi YTI dalam mempopulerkan wisata turut pula meningkatkan gairah wisata. Para wartawan media cetak dan elektronik saat itu cukup membawa dampak positif dalam perkembangan pariwisata. Kemudahan peraturan imigrasi untuk masuk dan keluar Indonesia, serta bea cukai yang dipermudah, ditambah lagi dengan adanya kerja sama dengan organisasi pariwisata internasional semakin mendorong perkembangan pariwisata Indonesia saat itu.

### *Lahirnya DTI (Dewan Tourisme Indonesia)*

Pada tanggal 12 sampai dengan 14 Januari 1957 YTI mengadakan Musyawarah Nasional Tourisme I. Dalam musyawarah ini terbentuk Dewan Tourisme Indonesia (DTI) melalui SK Kementrian Perhubungan RI Nomor H2/2/21 tanggal 8 April 1957, dan dikukuhkan menjadi satu-satunya badan pengelola pengembangan pariwisata. Dengan demikian maka semua badan lain di wilayah Indonesia lebur ke dalam DTI.

DTI cukup berkembang dan menghasilkan beberapa kegiatan antara lain :

- Kemudahan visa kunjungan ke Indonesia di seluruh KBRI di luar negeri
- Pengiriman SDM ke luar negeri untuk meningkatkan pengetahuan pariwisata
- Menjadi anggota organisasi-organisasi pariwisata dunia
- Menerima kunjungan tim riset PATA dalam rangka promosi pariwisata Indonesia melalui PATA
- Menghadiri konferensi – konferensi pariwisata dunia

PT Nitour dan Hotel Des Indes saat itu memegang jaringan terbesar dalam pengaturan wisatawan mancanegara di Indonesia. Atas ijin pemerintah, DTI membeli Nitour untuk dapat lebih mengembangkan kegiatannya.

Pada masa peralihan tersebut, situasi keamanan di Indonesia memanas sehingga muncul ancaman pembatalan kunjungan 4.500 wisman eks kapal pesiar Statendam, Kungsholn, Lurline, Caronia, dan Bergensjord yang diageni oleh Amexco dan Thomas Cooks. Atas lobi intens DTI dengan para operator tersebut, kunjungan wisman akhirnya terjadi dan berhasil sukses. Prestasi ini memperkuat kepercayaan pemerintah kepada DTI sebagai badan pengembang pariwisata.

Awal tahun 1958 DTI mengadakan Musyawarah Turisme II di Tretes. Salah satu hasil musyawarah adalah masalah keuangan organisasi, yang memerlukan pengembangan bentuk usaha dari non komersil menjadi komersil agar dapat mengembangkan usaha pariwisata yang diakuisisi. Terdapat pula hal penting yaitu istilah pariwisata yang mulai dipakai dalam munas ini yang dipopulerkan oleh GPH Djatikusumo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan darat.

Setelah menghadiri konferensi IUOTO (International Union of Official Travel Organization) Sultan Hamengkubuwono IX lebih berperan dalam pariwisata dunia, kemudian menteri perhubungan darat mengeluarkan keputusan Nomor H2/3/1960 tanggal 14 Maret 1960 yang intinya adalah :

- Menunjuk DTI sebagai satu satunya badan yang bertanggung jawab untuk mengatur turisme Indonesia
- Mengadakan penyusunan kembali DTI

Dalam menyusun rencana pengembangan Ekonomi Indonesia, Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS) memasukan pariwisata sebagai bagian dalam pengembangan perekonomian negara. Hal inilah yang menjadi titik tolak penting pariwisata Indonesia, yang menempatkan pariwisata sebagai bagian perekonomian negara. Dalam rancangan pembangunan nasional, DEPERNAS bersama MPRS melalui Ketetapan MPRS No. 1/1960 menetapkan proyek pariwisata sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional.

### *Lahirnya Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI)*

Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan, pemerintah melalui Kepres Nomor 65 berdasarkan UUD 1945 ayat 4 dan Ketetapan MPRS Nomor I/1960, menetapkan ;

Pertama, Membentuk panitia penampung orang asing, yang diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono IX

Kedua , Memberi tugas kepada dewan tersebut agar :

- Mempermudah masuknya orang asing ke Indonesia
- Menetapkan kebijaksanaan pengawasan
- Meningkatkan kesadaran wisata kepada seluruh masyarakat
- Memberi masukan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan pariwisata Indonesia

Munas DTI III yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Agustus 1961 di Jakarta kemudian menghasilkan beberapa keputusan antara lain :

- Perubahan nama DTI menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARNAS)
- Dukungan terhadap ketua Depari untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh pemerintah
- Persetujuan pelaksanaan konferensi PATA di Indonesia Tahun 1963
- Peletakan dasar-dasar usaha pariwisata seperti akomodasi internasional, travel agents, perbaikan dan perluasan sarana transportasi, penambahan frekuensi penerbangan.

Setahun kemudian dalam usaha menyediakan sumber daya manusia, pemerintah mendirikan Akademi Perhotelan di Bandung yang kemudian menjadi NHI/BPLP/STP, dan diikuti pula oleh berdirinya Akademi Pariwisata (AKTRIPA) Indonesia dibawah yayasan YAPARI, yang kemudian sekarang menjadi STIEPAR-YAPARI.

Penyelenggaraan konferensi PATA ke XII di Jakarta dengan workshop di Bandung, ternyata mampu menempatkan Indonesia menjadi salah satu jaringan pariwisata penting di kawasan Pasifik dan Timur jauh. Demikian pula posisi

dalam organisasi pariwisata dunia dimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Vice President dalam konferensi pariwisata di Roma.

### *Pembentukan Lembaga Pariwisata Nasional (LPN)*

Runtuhnya kabinet seratus menteri menandai sirnanya orde lama dan munculnya kabinet AMPERA yang diketuai oleh Suharto. Pada waktu inilah dibentuk LPN (Lembaga Pariwisata Nasional). Pengurus YTI dikukuhkan sebagai penasihat LPN.

Untuk mendukung program pemerintah, beberapa tokoh pariwisata menghimpun diri dalam Himpunan Perintis Pariwisata (RINTIS PARIWISATA) pada tanggal 21 Desember 1967. Pada masa itu peran gubernur DKI Ali Sadikin sangat mendukung perkembangan pariwisata di Jakarta dan Indonesia.

Di Bandung berdiri pula asosiasi pengusaha usaha pariwisata yang disebut West Java Tourist Association (WTA) yang banyak menggerakkan pariwisata di Jawa Barat

### ***Babak Baru Pariwisata Indonesia***

Tanggal 22 Maret 1969, LPN dibubarkan melalui Kepres Nomor 3 Tahun 1969, dan dilebur ke dalam Departemen perhubungan dengan status Direktorat Jenderal yang berkantor di Jalan MH Thamrin 61, sedangkan kantor di jalan Diponegoro 25 diserahkan kembali kepada DEPARI yang merupakan organisasi swasta.

Keluarnya Kepres Nomor 30 tahun 1969 pada tanggal 22 Maret 1969 tentang Pengembangan Pariwisata Nasional, memperluas wawasan perencanaan pariwisata karena perencanaan dibuat oleh DEPARNAS yang beranggotakan menteri – menteri yang berkaitan dengan pariwisata. Inpres nomor 9 Tahun 1969 mengembangkan tugas Departemen Perhubungan mengingat dalam pasal 2 Inpres tersebut dinyatakan bahwa :

1. Pengembangan pariwisata ditujukan untuk menghasilkan devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, dan mendorong usaha dan industri lainnya
2. Memperkenalkan keindahan dan budaya Indonesia
3. Meningkatkan persahabatan dan persaudaraan nasional dan internasional.

Untuk memperlancar pelaksanaan rencana pengembangan pariwisata, dibentuk BAPPARNAS (Badan Pengembangan Pariwisata Nasional) yang keanggotaannya terdiri dari kalangan pemerintah dan swasta. Badan ini merupakan induk dari BAPPARDA yang ada di masing-masing propinsi untuk memberi masukan kepada pemerintah.

### ***Perkembangan Pariwisata Indonesia dalam PELITA***

Pada pelita I yang dimulai tahun 1969, situasi dalam negeri masih dipenuhi oleh gejolak politik dan pemerintah masih memprioritaskan penataan perangkat politik nasional. Pariwisata masih belum dianggap cukup penting sehingga belum terdapat dalam GBHN meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan nasional bidang pariwisata melalui keppres nomor 30 tahun 1969 tanggal 22 Maret 1969 yaitu pembubaran LPN dan pembentukan Dirjen pariwisata. Pariwisata dalam GBHN, baru terdapat selintas dalam GBHN tahun 1978, namun diperluas dalam GBHN 1983, 1988 dan 1993. Dalam masa inilah terbentuk asosiasi PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada tanggal 9 Pebruari 1969, dan ASITA (Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies) pada tanggal 7 Januari 1971.

Pertumbuhan wisatawan mancanegara selama PELITA I dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**PERTUMBUHAN WISMAN  
SELAMA PELITA I 1969 – 1974)**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERTUMBUHAN (%)</b>	<b>DEVISA (RIBU USD)</b>
1968	52.400	-	-
1969	88.100	64,3	10.800
1970	129.319	50,3	16.200
1971	178.781	38,3	22.600
1972	221.195	23,8	27.600
1973	270.303	22,2	40.900

*Sumber : Dirjen Pariwisata*

Sebagai gambaran pula bahwa di saat yang sama jumlah kunjungan wisman ke Hongkong adalah 900.000, ke Jepang 800.000, Thailand 800.000. Hal itu menunjukkan bahwa kunjungan ke Indonesia masih sangat rendah.

Pada tahap ini pembangunan di Indonesia terfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, upaya pembangunan pariwisata hanya terfokus pada pemugaran bangunan bersejarah seperti kuil, keraton di Jawa dan Bali.

Pelita I menandai pula dibentuknya lembaga diklat pariwisata di Bandung oleh pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM pariwisata.

### **Perkembangan Pariwisata pada PELITA II**

Pada PELITA II antara tahun 1974 – 1978 banyak menghasilkan perbaikan dalam produk pariwisata dan kebijaksanaan pokok yang mendasari pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata. Studi kepariwisataan dan pembuatan rencana induk telah mulai diperhatikan, demikian pula perbaikan infrastruktur dan pembuatan daya tarik wisata baru, begitu juga promosi..

Kenaikan jumlah wisman pada PELITA I dapat terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.5**

**PERTUMBUHAN WISMAN  
DALAM PELITA II (1974 – 1978)**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERTUMBUHAN (%)</b>	<b>DEVISA (RIBU USD)</b>
1973	270.303	-	40.900
1974	313.452	22	54.400
1975	366.293	16	62.300
1976	401.237	9.5	70.600
1977	433.393	8	81.300
1978	486.614	8.1	94.300

*Sumber : Dirjen pariwisata*

**Perkembangan Pariwisata pada PELITA III**

Permulaan Pelita III dimulai dengan tercapainya jumlah kunjungan wisman sebanyak 500.000 orang, sementara jumlah kamar hotel tersedia telah mencapai 53.965 kamar. Lama tinggal wisman sudah mencapai 7 hari dan pengeluaran rata – rata per hari mencapai USD 40.

Kebijakan pemerintah yang mendorong perkembangan pariwisata nasional, dan pendirian kantor promosi di luar negeri seperti di : Frankfurt, San Fransisco, Tokyo, Sidney, dan Singapura sangat memacu pertumbuhan jumlah kunjungan wisman. Disamping itu terjadi pula pergerakan penumpang transportasi udara yang cukup menonjol dalam wilayah Indonesia sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel 4.6                      PERKEMBANGAN JUMLAH PENUMPANG  
ANGKUTAN UDARA TAHUN 1978 – 1982**

	<b>1978</b>	<b>1982</b>
BERANGKAT	4.418.012	6.438.010
DATANG	4.328.561	6.174.368

*Sumber : Dirjen Pariwisata*

Sebaran wisatawan pada Pelita III ini telah meliputi 10 Daerah tujuan wisata (DTW) meskipun jumlah kunjungan ke masing-masing DTW belum merata. Di sisi lain, perkembangan terjadi pula dalam bidang diklat pariwisata. Tercatat 24 lemdiklat pariwisata di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah wisman selama PELITA III dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.7** **PERTUMBUHAN WISMAN**  
**DALAM PELITA III (1979 - 1984)**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERTUMBUHAN (%)</b>	<b>DEVISA (JUTA USD)</b>
1979	501.470	7	188
1980	561.178	11.9	289
1981	600.151	6.9	309,1
1982	592.046	- 1.35	358,8
1983	638.855	7.9	439,5
1984	700.910	9.7	623,3

*Sumber : Dirjen Pariwisata*

Dapat ditambahkan bahwa ketika tahun 80-an, Indonesias mengalami jatuhnya ekspor minyak, sehingga pemerintah mulai mencari pilihan ekspor non migas. Kebijakan pembangunan ditujukan untuk menciptakan iklim yang baik , untuk mendukung penanaman modal yang berkaitan dengan industri dan kepariwisataan, dan mendorong pengembangan pariwisata di daerah yang sudah ada kegiatan pariwisatanya. Peran serta masyarakat dan perbaikan kelembagaan mendapat perhatian khusus.

#### ***Perkembangan Pariwisata selama PELITA IV***

Kebijakan bebas visa untuk 38 negara, penambahan tiga bandar udara di Biak, Manado dan Ambon, penetapan 13 point entries melalui udara, berfungsinya 9 pelabuhan laut serta berbagai kebijakan lainnya seperti pengaturan, produk, pemasaran, penanaman modal, Sumber Daya Manusia, dan

Litbang pariwisata telah meningkatkan jumlah kunjungan wisman sehingga mencapai 1,2 juta orang pada tahun 1985 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 14 % per tahun sejak tahun 1981.

**Tabel 4.8**

**KEMAJUAN PARIWISATA NASIONAL  
TAHUN 1987 DAN 1988**

URAIAN	1987	1988	PERTUMBUHAN (%)
WISMAN	1.060.347	1.286.371	2
DEVISA (USD)	874,3 JUTA	1.060.800	21,2
TENAGA KERJA	1,24 JUTA	1,300.000	4
HOTEL	290	389	34,1
JUMLAH KAMAR	23.964	29.467	23,1
TRAVEL AGENT	604	708	17
PRAMUWISATA	1.892	2.143	13,2

*Sumber : Dirjen Pariwisata*

***Perkembangan Pariwisata pada PELITA V***

Tujuh Kebijakan strategi pokok pariwisata dalam Pelita V yaitu :

1. Promosi pariwisata yang konsisten
2. Penambahan aksesibilitas
3. Mempertinggi kualitas pelayanan dan produk pariwisata
4. Pengembangan daerah tujuan wisata
5. Promosi daya tarik alam, satwa, dan wisata bahari
6. Mempertinggi kualitas SDM
7. Melaksanakan kampanye wisata melalui Sapta Pesona

. Berdirinya 17 perusahaan jasa konvensi yang memulai kiprahnya dalam penyelenggaraan konvensi internasional, perjalanan insentif dan penyelenggaraan pameran menambah ramainya dunia kepariwisataan Indonesia saat itu..

Pada tahun 1988 terdapat pula pembangunan dan perluasan 67 hotel berbintang dan dikeluarkan ijin penanaman modal untuk 7 proyek pariwisata lainnya senilai Rp. 107,5 milyar.

**Tabel 4.9**

**KUNJUNGAN WISMAN  
PADA PELITA V**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KUNJUNGAN</b>	<b>PEROLEHAN DEvisa (JUTA USD)</b>
1989	1.625.965	1.284.50
1990	2.177.566	2.105.30
1991	2.569.870	2.522.00
1992	3.064.161	3.278.20
1993	3.403.138	3.640.80

Sumber : Dirjen pariwisata

Bagian akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap I adalah masa pemantapan, pada masa itu pemerintah mengumumkan Sapta Pesona Produk Pariwisata Indonesia :

1. Keamanan
2. Ketertiban
3. Kebersihan
4. Kes
5. Keindahan
6. Keramahan
7. Kenangan

Pada tahun 1991, pemerintah mencanangkan Visit Indonesia Year / Tahun Kunjungan Indonesia.

### ***Perkembangan Pariwisata pada PELITA VI***

Pada tahun 1992 melalui Keppres nomor 60/1992 pemerintah mencanangkan DEKUNI (Dekade Kunjungan Indonesia) yaitu tema tahunan pariwisata sampai dengan tahun 2000 yaitu :

1. Tahun 1993 : Tahun Lingkungan Hidup
2. Tahun 1994 : Tahun Peranan Wanita dalam Pembangunan Pemuda dan Olahraga
3. Tahun 1995 : 50 Tahun Kemerdekaan
4. Tahun 1996 : Tahun Bahari dan Dirgantara
5. Tahun 1997 : Tahun Telekomunikasi
6. Tahun 1998 : Tahun Seni dan Budaya
7. Tahun 1999 : Tahun Kriya dan Rekayasa
8. Tahun 2000 : Tahun Pemanfaatan Teknologi Untuk Peningkatan Kualitas Hidup

Dalam kurun waktu tahun 1994 – 1998 pembangunan pariwisata sudah dapat menunjukkan peran nyata untuk perekonomian negara yang sedang mengalami krisis. meskipun pada ahir Pelita ditandai dengan menghangatnya kondisi politik dan ancaman terhadap keamanan wisatawan, namun jumlah wisman mencapai 5,3 juta orang, dibawah prediksi sebanyak 6 juta orang. Namun peningkatan terjadi dalam jumlah kunjungan wisnus yaitu sebanyak 83.669.000 orang.

Pada akhir Pelita VI ini ditandai pula dengan penajaman visi dan misi pariwisata, serta berbagai studi untuk mendukung rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Kemajuan lainnya dicapai pula oleh sarana pariwisata lainnya seperti :

1. Akomodasi : 270.379 Kamar
2. Biro Perjalanan : 1.370 Buah
3. Pramuwisata : 6.586 Orang

Jika kita rangkumkan., PELITA VI yang termasuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. ini, maka pembangunan kepariwisataan

Indonesia, mengacu pada : pengembangan sumber daya manusia , baik jumlah maupun kuantitas, keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan budaya, pembangunan pariwisata ditujukan untuk pengembangan wilayah yang belum berkembang. Secara implisit terdapat pergeseran yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori : dari pembangunan fisik ke pembangunan non fisik, dari kuantitas ke kualitas, dan dari keuntungan ekonomi ke keberlanjutan ( Myra P Gunawan dalam Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan, Pariwisata Indonesia : Dulu, kini dan yang akan datang 1997:20)

Sumber :

- DEPARI, Fakultas Sastra UGM, PUSPAR UGM, Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kepariwisata Indonesia dari masa Ke Masa.1997.
- Gunawan, Myra P. ed.1997 Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan ; Pariwisata, Dulu,Kini dan Yang Akan Datang.ITB,Bandung